

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA YANG DIMEDIASI
DENGAN PERENCANAAN STRATEGIS
(Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Bantul)**

Solehah Putri Sumarsana
solehahputrisumarsana@gmail.com

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi pengelola BUMDes, akuntabilitas pengelolaan BUMDes, dan perencanaan strategis. Sampel yang digunakan adalah ketua dan bendahara BUMDes yang terdapat Di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Uji Hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis SEM (*structural equation modelling*) berbasis *variance* atau *partial least squares* dengan menggunakan aplikasi software SmartPLS V.3.2.8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes, partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis, dan kompetensi pengelola BUMDes secara langsung tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes, serta kompetensi pengelola BUMDes secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pengelola BUMDes, Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes, dan Perencanaan Strategis.

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi di wilayah pedesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan belum memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat di pedesaan. Salah satu bentuk pendekatan yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian di pedesaan, yang melalui kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 78 ayat 1, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa yang

dimiliki. Berdasarkan Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dilihat dari berbagai aspek, BUMDes telah memberikan potensi yang besar dalam hal perekonomian Indonesia. Adanya potensi yang besar dalam hal peningkatan perekonomian Indonesia, maka pemerintah dengan gigihnya menggerakkan BUMDes hingga ke pelosok nusantara (ksp.go.id). Tak hanya itu, bahkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo berharap agar prioritas penggunaan dana desa 2019 lebih banyak dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi, karena ia merasa bahwa program pembangunan untuk infrastruktur telah dirasa cukup (finance.detik.com).

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan mengenai segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, kepada pihak yang memberikan amanah, dimana pihak pemberi amanah tersebut memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Mardiasmo (2002) juga membagi akuntabilitas menjadi dua bagian, yakni akuntabilitas terhadap otoritas yang lebih tinggi (vertikal) serta akuntabilitas kepada masyarakat luas (horizontal). Menurut Darise (2006) akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dari suatu pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang, dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas menjadi hal yang penting bagi pemerintah, karena akuntabilitas dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui apakah program yang telah dijalankan oleh pemerintah itu telah berhasil atau tidak, selain itu akuntabilitas juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menemukan cara yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki program agar menjadi lebih baik (Onuorah dan Appah, 2012).

Menurut Nurdin (2014), perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dimiliki, yang dihadapi, dan yang mungkin timbul. Nurdin (2014) menyatakan bahwa dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suwono (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif perencanaan strategis terhadap kinerja perusahaan diterima artinya perencanaan strategis memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan di PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah (2016), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perencanaan strategis tidak berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui inovasi terhadap kinerja usaha UMKM potensi ekspor di Blitar.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program terkait dengan pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan diperoleh jika program-program yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hardianti *et al.*, 2017). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017) Di Kabupaten Gorontalo, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akuntabilitas pengelolaannya bagus. Penelitian yang dilakukan oleh Kasila & Kolopaking (2018) menyatakan bahwa pengaruh partisipasi, khususnya partisipasi pemuda dalam perkembangan BUMDes masih dalam taraf kategori sedang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti *et al.*, (2017), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang betapa pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung program pembangunan tersebut.

Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan. Aparatur pemerintah harus memiliki

keahlian yang baik, atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dalam rangka meningkatkan kualitas atau kompetensinya. Menurut Aini *et al.*, (2014) mengemukakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rofika dan Ardianto (2014), dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kompetensi pegawai dalam suatu instansi tidak berperan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas belum konsisten. Peneliti menduga bahwa pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas akan efektif jika partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan-masukan digunakan untuk perencanaan strategis. Jika perencanaan strategis tersebut diimplementasikan, dan dijalankan dengan baik, maka dapat meningkatkan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian terdahulu, pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas belum konsisten. Peneliti menduga bahwa dalam melakukan perencanaan strategis, tidak hanya melibatkan orang-orang yang pandai saja, namun juga harus melibatkan orang-orang yang berkompeten. Dengan adanya kompetensi pengelola BUMDes yang baik, maka dapat melakukan penyusunan perencanaan strategis dengan baik. Kemudian, apabila perencanaan strategis yang telah disusun oleh orang yang berkompeten tersebut dijalankan dengan baik, maka dapat meningkatkan akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan replikasi dari penelitian Mada *et al.*, (2017). Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu sampel penelitian diambil di Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga menghilangkan variabel komitmen organisasi, serta mengganti variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Dalam penelitian ini juga menambahkan variabel perencanaan strategis sebagai variabel intervening.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori Stewardship merupakan teori yang memberikan gambaran tentang kondisi para manajer yang tidak memiliki dorongan untuk melakukan pencapaian tujuan individu, namun lebih terdorong untuk melakukan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Teori ini telah dirancang untuk mendorong para eksekutif sebagai steward untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya, karena steward akan berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Teori steward akan digunakan oleh peneliti untuk menguji motivasi eksekutif dalam organisasi untuk bertindak baik terhadap prinsipalnya.

Pengaruh perencanaan strategis terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes

Perencanaan strategis adalah proses memutuskan bagaimana mencapai serangkaian tujuan strategis. Menurut Nurdin (2014), perencanaan strategis khususnya digunakan untuk mempertajam fokus organisasi, agar semua sumber organisasi digunakan secara optimal untuk melayani misi organisasi itu. Perencanaan strategis menekankan pentingnya membuat keputusan-keputusan yang menempatkan organisasi untuk berhasil menanggapi perubahan lingkungan. Fokus perencanaan strategis adalah pada pengelolaan strategis, artinya penerapan pemikiran strategis pada tugas memimpin sebuah organisasi guna mencapai maksudnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rue & Ibrahim (1998), terdapat hubungan positif antara perencanaan strategis dengan kinerja. Dengan adanya perencanaan strategis, maka dapat meningkatkan keuntungan. Perencanaan strategis juga merupakan kunci untuk menuju sukses. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Shrader et al (1989), terdapat kaitan yang erat antara perencanaan strategis dengan kinerja. Ketika perencanaan strategis diterapkan dengan baik, maka akuntabilitas pengelolaan BUMDes juga akan baik. Karena, dengan adanya perencanaan strategis yang baik, maka pengelolaan BUMDes akan lebih terarah sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah disusun sehingga akuntabilitas akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Perencanaan strategis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Pengaruh partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perencanaan strategis terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes

Akuntabilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan masyarakat. Keputusan yang akan diambil oleh pengelola BUMDes haruslah melibatkan masyarakat, hal ini sejalan dengan teori partisipasi yang menjelaskan bahwa masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan (Handayani, 2006). Hidayah (2017) menyatakan bahwa dalam proses perencanaan program penggunaan dana desa di wilayah Wonodadi telah melaksanakan prinsip partisipatif. Menurut Juwita (2014) perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas publik di provinsi Banten.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Umaira & Adnan (2019), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018), menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari partisipasi terhadap akuntabilitas dana desa, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkat partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi jumlah individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{2a} : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

H_{2b} : Partisipasi masyarakat secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.

Pengaruh kompetensi pengelola BUMDes secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perencanaan strategis terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes

Aparat yang berkompeten akan menghasilkan output yang baik, yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan teori stewardship, dimana aparat

yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan BUMDes akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya.

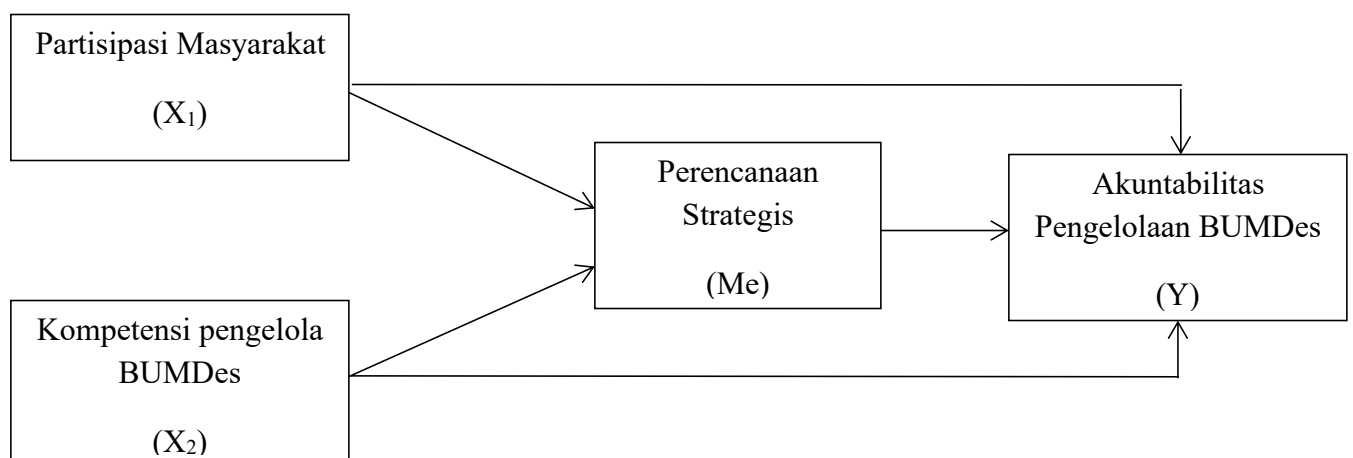
Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Aziz (2016) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia. Fahrul (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Juwita (2014) perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik di provinsi Banten. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{3a} : Kompetensi pengelola BUMDes berpengaruh positif secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

H_{3b} : Kompetensi pengelola BUMDes secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.

Model Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Sampel dan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan objek penelitiannya yaitu BUMDes yang ada di Kabupaten Bantul. Subyek dalam penelitian ini adalah pengelola

BUMDes yang ada di Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk subjek penelitian yaitu ketua dan bendahara BUMDes yang terdapat Di Kabupaten Bantul. Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan jenis data berupa data primer. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner.

Skala Pengukuran

Seluruh variabel diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Skala tersebut menunjukkan, yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Ragu-ragu (RR), 4) Setuju (S), dan 5) Sangat Setuju (SS).

Definisi Operasional Variabel

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang harus ada demi terwujudnya cita-cita organisasi. Dalam program pemerintah, partisipasi masyarakat menjadi bagian yang terpenting, sehingga pemerintah berupaya untuk mengembangkan partisipasi masyarakat tersebut. Dengan partisipasi yang bagus, maka program pemerintah dapat berjalan dengan baik karena masyarakat benar-benar terlibat dalam program tersebut. Variabel partisipasi masyarakat diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Daud (2017). Kuesioner terdiri dari 5 item pertanyaan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Kompetensi adalah keahlian dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang meliputi pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga efektif, profesional, dan efisien dalam pelaksanaan tugas oleh pegawai dapat tercipta. Variabel kompetensi pengelola BUMDes diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Harningsih (2012). Kuesioner terdiri dari 11 item pertanyaan.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan sasaran yang ingin dicapai, serta tindakan yang seharusnya dilakukan. Perencanaan juga merupakan suatu aktivitas yang bertujuan dan dinamis yang berkenaan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Variabel perencanaan strategis diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh penulis mengenai indikator-indikator dari perencanaan strategis yang dikutip dari Fred & Forest (2015). Kuesioner terdiri dari 7 item pertanyaan.

Akuntabilitas merupakan bentuk korelasi yang terjadi antara pihak pengelola dengan masyarakat. Pihak pengelola berkewajiban kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai suatu keadaan yang sebenarnya, dimana hal ini menjadi sangat penting, karena prinsipal perlu mengetahui semua keadaan yang terjadi di masyarakat. Iyoha dan Oyerinde (2010) menerangkan bahwa pengelola memiliki peran yang penting dalam keberhasilan tingkat akuntabilitas publik, dimana tingkat akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kepuasan publik. Akuntabilitas pengelolaan BUMDes diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Apriyani (2015). Kuesioner tersebut terdiri dari 5 item pertanyaan.

Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Model Pengukuran atau Outer Model

Outer model menunjukkan bagaimana sebuah konstruk/variabel manifes merepresentasikan atau memperlihatkan konstruk/variabel laten untuk diukur. Evaluasi PLS model pengukuran atau *outer model* digunakan untuk melihat maupun menilai validitas dan reliabilitas model. Model pengukuran dievaluasi melalui *convergent validity* dan *discriminant validity* dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten untuk melihat validitas konstruk, serta *composite reliability* dan *cronbach alpha* untuk blok indikatornya untuk melihat reliabilitas konstruk.

3. Pengujian Model Struktural atau Inner Model

a. *Coefficient of Determination* (R^2)

Evaluasi atau penilaian model struktural dilakukan dengan melihat nilai *R-square* pada setiap variabel dependen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai *R-squares* 0,75 memiliki intepretasi bahwa model yang dibangun kuat, nilai 0,50 memiliki intepretasi bahwa model yang

dibangun moderat, dan nilai 0,25 memiliki interpretasi bahwa model yang dibangun lemah.

b. Uji hipotesis

Setelah melihat nilai *R-square*, evaluasi model struktural dilanjutkan dengan melihat nilai signifikansi untuk melihat pengaruh antar konstruk. Melihat nilai signifikansi dilakukan melalui prosedur resampling dengan teknik *bootstrapping*. *Bootstrap* menggunakan seluruh sampel asli dalam melakukan resampling, dengan rekomendasi untuk *number of bootstrap samples* yakni sebesar 5.000 atau lebih besar dari sampel asli. Nilai signifikansi (*two-tailed*) yang digunakan yakni sebesar 1,96 dengan *significance level* sebesar 5%. Ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis dapat dilihat melalui nilai *P-Values*. Ketika *P-Values* memiliki nilai kurang dari 0,05 maka untuk hipotesis yang dibangun terdukung atau diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengambil sampel sebanyak 48 BUMDes yang terdapat di Kabupaten Bantul. Kuesioner yang berhasil dikirim untuk seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Bantul adalah 100%. Untuk kuesioner yang berhasil kembali adalah sebesar 59%. Jumlah kuesioner yang tidak kembali adalah sebesar 41%.

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai berapa jumlah sampel, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Statistik Deskriptif

Variabel	N	Std. Dev	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual		
			Min	Max	Mean	Min	Max	Mean
Partisipasi Masyarakat (PM)	57	3.379	5	25	15	5	25	20.63
Kompetensi Pengelola BUMDes (KP)	57	6.519	11	55	33	14	55	45.88
Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes (AP)	57	3.183	5	25	15	5	25	20.89
Perencanaan Strategis (PS)	57	3.495	7	35	21	16	35	28.04

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan uji statistik deskriptif mengenai jawaban responden untuk setiap variabel penelitian dimana keseluruhan berjumlah 57 jawaban responden. Seluruh variabel menunjukkan nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran aktual lebih besar daripada nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran teoritis. Selain itu, seluruh variabel juga memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean (rata-rata) pada kisaran aktual yang menunjukkan semakin kecil penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian, tanggapan responden baik dan di atas perkiraan.

2. Menilai Outer Model atau Measurement Model

a. Uji Validitas

Uji validitas convergent dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk masing-masing indikator konstruk. Nilai *loading factor* merupakan korelasi antara skor item dengan skor konstruk yang dibangun.

**Tabel 2: Outer Loadings/Loading Factor
(Measurement Model)**

Konstruk	Model Awal	Modifikasi 1	Modifikasi 2
Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes (AP)			
AP_1	0,816	0,815	0,816
AP_2	0,856	0,855	0,855
AP_3	0,828	0,828	0,828
AP_4	0,868	0,869	0,868
AP_5	0,646	0,647	0,648

Kompetensi Pengelola BUMDes (KP)			
KP 1	0,895	0,895	0,894
KP 2	0,898	0,898	0,897
KP 3	0,542	0,542	0,539
KP 4	0,816	0,816	0,816
KP 5	0,886	0,886	0,887
KP 6	0,891	0,891	0,891
KP 7	0,865	0,856	0,856
KP 8	0,725	0,726	0,728
KP 9	0,833	0,833	0,833
KP 10	0,868	0,868	0,867
KP 11	0,876	0,876	0,875
Partisipasi Masyarakat (PM)			
PM 1	0,874	0,874	0,874
PM 2	0,848	0,849	0,849
PM 3	0,804	0,805	0,806
PM 4	0,860	0,860	0,860
PM 5	0,879	0,879	0,878
Perencanaan Strategis (PS)			
PS 1	0,823	0,833	0,849
PS 2	0,840	0,867	0,893
PS 3	0,811	0,840	0,867
PS 4	0,723	0,719	0,710
PS 5	0,603	0,564	0,506
PS 6	0,511	0,478	-
PS 7	0,498	-	-

Sumber : Pengolahan Data Dengan PLS, 2019

Tabel 2 hasil pengolahan data yang telah dimodifikasi tahap 2 dengan menggunakan smartPLS, dapat dilihat bahwa semua indikator pembentuk konstruk memiliki nilai *loading factor* diatas 0,50. Dengan demikian, maka seluruh konstruk telah memenuhi *convergent validity*.

Setelah adanya eliminasi indikator yang belum memenuhi *convergent validity*, pengujian validitas convergen dilanjutkan dengan dengan cara melihat nilai AVE dan *communality* pada seluruh konstruk.

Tabel 3: Construct Validity

Konstruk	AVE	Communality
AP	0,651	0,871
KP	0,692	0,963
PM	0,729	0,910
PS	0,606	0,865

Berdasarkan tabel 3, untuk masing-masing konstruk memiliki nilai AVE lebih dari 0,50, dan memiliki nilai *communality* lebih dari 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruk yang dibangun mempunyai *convergent validity* yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masing-masing konstruk memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0,50, nilai AVE lebih dari 0,50, serta nilai *communality* lebih dari 0,70.

b. Mengevaluasi Discriminant Validity

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur atau variabel manifes konstruk yang berbeda sebaiknya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Dengan demikian, pengujian validitas diskriminan dilakukan untuk membuktikan apakah indikator pada suatu konstruk akan memiliki nilai *loading factor* terbesar pada konstruk yang dibentuknya daripada *loading factor* dengan konstruk yang lain.

Tabel 4: Nilai Discriminant Validity (cross loading)

	AP	KP	PM	PS
AP 1	0,816	0,503	0,557	0,652
AP 2	0,855	0,576	0,758	0,619
AP 3	0,828	0,543	0,634	0,690
AP 4	0,868	0,597	0,640	0,602
AP 5	0,648	0,468	0,465	0,590
KP 1	0,537	0,894	0,649	0,563
KP 2	0,480	0,897	0,489	0,529
KP 3	0,210	0,539	0,307	0,225
KP 4	0,539	0,816	0,549	0,569
KP 5	0,451	0,887	0,450	0,449
KP 6	0,627	0,891	0,510	0,597
KP 7	0,614	0,856	0,495	0,620
KP 8	0,638	0,728	0,569	0,646
KP 9	0,652	0,833	0,542	0,672
KP 10	0,524	0,867	0,465	0,560
KP 11	0,614	0,875	0,470	0,629
PM 1	0,715	0,590	0,874	0,579
PM 2	0,631	0,529	0,849	0,675
PM 3	0,565	0,465	0,806	0,504
PM 4	0,683	0,414	0,860	0,537
PM 5	0,663	0,514	0,878	0,618
PS 1	0,659	0,730	0,568	0,849
PS 2	0,663	0,684	0,628	0,893
PS 3	0,594	0,631	0,523	0,867

PS 4	0,658	0,315	0,591	0,710
PS 5	0,451	0,132	0,293	0,506

Sumber : Pengolahan Data Menggunakan PLS, 2019

Berdasarkan tabel 4, nilai *cross loading* yang diperoleh menunjukkan adanya validitas diskriminan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi antara indikator terhadap konstraknya bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antara indikator terhadap konstruk yang lainnya. Sebagai contoh, AP_1 (indikator pertanyaan untuk akuntabilitas pengelolaan BUMDes) memiliki nilai *loading factor* sebesar 0,816, lebih besar dari nilai *loading factor* konstruk lainnya, yakni KP, PM, serta PS.

Cronbach's alpha dan *composite reliability* merupakan nilai yang akan mencerminkan tingkat reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan guna membuktikan akurasi, konsistensi, serta ketepatan instrumen dalam mengukur suatu konstruk. Konstruk dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60, serta memiliki nilai *composite reliability* lebih dari 0,70.

Tabel 5: Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Konstruk	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
AP	0,904	0,863
KP	0,961	0,954
PM	0,931	0,907
PS	0,881	0,828

Sumber : Pengolahan Data Menggunakan PLS, 2019

Berdasarkan tabel 5 diatas, pada masing-masing konstruk memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60. Pada masing-masing konstruk juga memiliki nilai *composite reliability* lebih dari 0,70. Dengan demikian, maka untuk masing-masing konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

3. Pengujian Struktur Model (Inner Model)

- a. *Coefficient of Determination* (R^2)

Pengujian struktur model atau *inner model* dilakukan untuk mengetahui kekuatan estimasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Evaluasi PLS model struktural atau *inner model* digunakan untuk melihat serta memprediksi hubungan antar variabel laten.

Tabel 6: Nilai *R-Square*

Konstruk	<i>R-Square</i>
AP	0,707
PS	0,576

Sumber: Pengolah Data Menggunakan PLS, 2019

Berdasarkan tabel 6, hasil evaluasi *inner model* menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes (AP) adalah sebesar 0,707. Hal ini menunjukkan bahwa 70,7% variabel akuntabilitas pengelolaan BUMDes dapat dijelaskan oleh 2 (dua) variabel, yakni partisipasi masyarakat dan kompetensi pengelola BUMDes. Sisanya yakni sebesar 29,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Sedangkan nilai *Adjusted R Square* untuk variabel Perencanaan Strategis (PS) adalah sebesar 0,576. Hal ini menunjukkan bahwa 57,6% variabel perencanaan strategis dapat dijelaskan oleh 2 (dua) variabel independen, yakni partisipasi masyarakat dan kompetensi pengelola BUMDes. Sisanya yakni sebesar 42,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

b. Uji Hipotesis

Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada *output results for inner weights*.

Tabel 7: Results of Inner Weights

<i>Relation</i>	<i>Original Sample Estimate (O)</i>	<i>Mean of Subsamples (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistics (O/STERR)</i>	<i>P-Values</i>
KP-AP	0,160	0,135	0,101	1,575	0,058
PM-AP	0,397	0,380	0,110	3,603	0,000
PM-PS	0,430	0,419	0,124	3,462	0,000
KP-PS	0,432	0,420	0,120	3,607	0,000
PS-AP	0,400	0,424	0,109	3,674	0,000
KP-PS-AP	0,173	0,179	0,072	2,395	0,008
PM-PS-AP	0,172	0,175	0,064	2,682	0,004

Sumber : Pengolahan Data Menggunakan PLS, 2019

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 7, pengujian hipotesis pertama yakni pengaruh perencanaan strategis terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes menunjukkan nilai *original sample estimate* (O) sebesar 0,400 dengan nilai positif, dan memiliki nilai *P-Value* sebesar 0,000. Nilai *P-Value* yang kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa hipotesis mengenai perencanaan strategis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes **terdukung**.

Pada tabel 7, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes memiliki nilai *original sample estimate* (O) sebesar 0,397 dan bernilai positif, serta *p-value* sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis mengenai partisipasi masyarakat berpengaruh positif secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes **terdukung**. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis memiliki nilai *original sample estimate* (O) sebesar 0,172 dan bernilai positif, serta memiliki *p-value* sebesar 0,004 kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis mengenai partisipasi masyarakat berpengaruh positif secara tidak langsung dengan melalui perencanaan strategis terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes **terdukung**.

Pada tabel 7, pengaruh kompetensi pengelola BUMDes terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes memiliki nilai *original sample estimate*

(O) sebesar 0,160 dan bernilai positif, serta memiliki nilai *P-value* sebesar 0,058 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis mengenai kompetensi pengelola BUMDes berpengaruh positif secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes **tidak terdukung**. Pengaruh kompetensi pengelola BUMDes terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis memiliki nilai *original sample estimate* (O) sebesar 0,173 dan bernilai positif, serta memiliki nilai *p-value* sebesar 0,008 kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis mengenai kompetensi pengelola BUMDes berpengaruh positif secara tidak langsung dengan melalui perencanaan strategis terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes **terdukung**.

Pengujian Tambahan

Dalam penelitian ini, terdapat pengujian tambahan mengenai pengujian untuk masing-masing BUMDes. Dalam uji tambahan ini, yang menjadi sampel penelitian adalah BUMDes yang terdapat Di Kabupaten Bantul.

Tabel 8: Results of Inner Weights

<i>Relation</i>	<i>Original Sample Estimate (O)</i>	<i>Mean of Subsamples (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistics (O/STERR)</i>	<i>P-Values</i>
KP-AP	0,519	0,159	0,123	1,297	0,098
PM-AP	0,296	0,270	0,233	1,271	0,102
PM-PS	0,642	0,658	0,097	6,587	0,000
KP-PS	0,247	0,247	0,102	2,435	0,008
PS-AP	0,441	0,470	0,219	2,015	0,022
KP-PS-AP	0,109	0,118	0,076	1,440	0,075
PM-PS-AP	0,283	0,309	0,152	1,866	0,031

Sumber : Pengolahan Data Menggunakan PLS, 2019

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan unit analisis BUMDes, pengaruh kompetensi pengelola BUMDes terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes memiliki taraf signifikansi 9,8%. Ketika terdapat perencanaan strategis sebagai variabel mediasi, pengaruh kompetensi pengelola BUMDes terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes memiliki taraf signifikansi 7,5%, dengan demikian maka

perencanaan strategis sebagai variabel mediasi mempunyai peran memediasi penuh (*fully mediated*) hubungan antara kompetensi pengelola BUMDes terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Pengaruh partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes, kemudian dengan adanya perencanaan strategis sebagai variabel mediasi, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes dengan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, perencanaan strategis sebagai variabel mediasi mempunyai peran memediasi penuh (*fully mediated*) hubungan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Pengaruh Perencanaan Strategis terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa perencanaan strategis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Semakin baik perencanaan strategis yang dilakukan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Adanya perencanaan strategis yang baik dalam pengelolaan BUMDes, maka akan dengan mudah mencapai tujuan BUMDes yang telah ditetapkan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perencanaan strategis terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes

- a) Partisipasi masyarakat secara langsung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Menurut teori *stewardship*, pengelola yang diberi tugas dan tanggungjawab harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk laporan yang sesuai dengan aturan dan akuntabel, sehingga dengan terlibatnya masyarakat dalam memantau dan menilai pengelolaan BUMDes, akan mengurangi tingkat kecurangan atau penyelewengan yang akan dilakukan oleh pengelola dikarenakan dipantau dan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan BUMDes akan menjadi patokan pengelola dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dengan terlibatnya masyarakat, maka pengelola dapat mengetahui harapan yang muncul dari masyarakat.

- b) Partisipasi masyarakat secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.

Menurut Abe (2005:91), suatu perencanaan yang berbasis prakarsa masyarakat adalah perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrit masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan akan membawa dampak penting yaitu: (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, dan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat; (2) memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; (3) meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat. Adanya partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, dan kemudian aspirasi tersebut diimplementasikan dalam perencanaan strategis, maka akuntabilitas pengelolaan BUMDes dapat meningkat.

Pengaruh Kompetensi Pengelola BUMDes secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perencanaan strategis terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes

- a. Kompetensi pengelola BUMDes secara langsung tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes

Joko (2005) menyatakan bahwa kinerja individu dapat optimal jika individu memiliki kompetensi yang dapat diandalkan di bidangnya. Keandalan kompetensi sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu, antara lain: (1) Kompetensi pencapaian tujuan, (2) kompetensi pemecahan masalah, (3) kompetensi interaksi dengan orang lain dan (4) kompetensi kerja tim. Penilaian kompetensi juga dikemukakan oleh Spencer dan Spencer (1993), yaitu ada 20 jenis kompetensi dan salah satunya adalah kerja tim (*teamwork*). Berdasarkan kuesioner yang diberikan, pertanyaan yang diajukan cenderung menilai kompetensi individu pengelola BUMDes, sehingga tidak mencerminkan kompetensi interaksi dengan orang lain dan kompetensi kerja tim (*teamwork*). Oleh karena itu kompetensi pengelola BUMDes tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

- b. Kompetensi pengelola BUMDes secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis

Menurut Sumarsono (2003) sumber daya manusia merupakan kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu yang telah ditentukan agar menghasilkan barang atau jasa. Menurut Robbin (2007) kompetensi merupakan kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaannya, yang mana kemampuannya tersebut terdiri dari faktor kemampuan intelektual dan fisik. Berkaitan dengan pengelolaan BUMDes, tentu saja sumber daya manusia yang memumpuni sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan strategis serta akuntabilitas pengelolaannya. Jika pengelola BUMDes berkompoten dalam menyusun perencanaan strategis, tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan BUMDes tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dan kompetensi pengelola BUMDes terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes yang dimediasi dengan perencanaan strategis. Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdapat Di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah perencanaan strategis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes, partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis, dan kompetensi pengelola BUMDes secara langsung tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes, sedangkan kompetensi pengelola BUMDes secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel penelitian yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan BUMDes, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan ada penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas subyek penelitian yang dilakukan serta menambah besaran sampel yang diuji. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan

hasil yang memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Perluasan subyek penelitian diharapkan tidak hanya sebatas pada satu kelompok atau wilayah tertentu, namun beberapa lingkup kelompok maupun wilayah yang lebih luas lagi, seperti pada tingkat provinsi maupun pulau.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yakni penelitian ini masih menggunakan cakupan wilayah sampel yang masih kecil, yakni hanya dalam satu kabupaten sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh BUMDes diseluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI Press. Aikins, Stephen.
- Aini, N., Nur, E., dan Julita. 2015. Analisis Pengaruh Unsur-unsur *Internal Control System* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1-14.
- Ainswort, Murray., N. Smith., dan A. Millership. 2007. *Managing Performance Managing People*. Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Alim, M.N., Hapsari, T., dan Purwanti, L. 2007. “Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi”. Simposium Nasional Akuntansi 10. Makassar.
- Apriyani, Fira. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol.13, No.2 Hal. 193-211.
- Bastian, Indra. (2005) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bookstein, C. F. and F. L. (1982). Two Structural Equation Models: LISREL and PLS Applied to Consumer Exit-Voice Theory. *Journal of Marketing*, 19(4), 440–452.
- Bryson, John M. 1988. *Strategic Planning for Public and Non-profit Organizations*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Bryson, John M. dan R.C. Einsweiler, eds. 1988. *Strategic Planning: Threats and Opportunities for Planners*. Chicago, Illinois: Planners Press.
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation

Modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295, 336

Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Terjemahan Susetiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Indeks.

Daud, Efra Soeharso. 2017. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 Di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta*. *Thesis*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Deppennas PKDSP, *Buku Panduan BUMDes*, (Jakarta: PP-RPDN),2007,h.13.

Djunaedi, Achmad. 1995. *Perencanaan Strategis untuk Perkotaan: Belajar dari Pengalaman Negara Lain*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. No. 19/Juni: 20-25.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–

Fahrul, Riska Razi. 2017. *Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, dan Kompetensi Aparat Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. *JOM Fekon* Vol.4 No.1.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares - Konsep, Teknik, Dan Aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0 (Edisi 2)*. Semarang: Badan Penerbit - Universitas Diponegoro.

Gordon, Gerald L. 1993. *Strategic Planning for Local Government*. Washington, DC: ICMA.

Hardianti, S., Muhammad, H., & Lutfi, M. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota)*. *e-Journal Katalogis*. Vol.5, No.1, Hal.120-126.

Harningsih, Sri. 2012. *Pengaruh Kometensi Karyawan dan Konflik Peran terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo)*. *Thesis*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hidayah dan Wijayanti. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. *Jurnal AKSI* Vol 2 Edisi 1 September 2017 p-ISSN :2528-6145 dan e-ISSN : 254-3198.

Indra Bastistan. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Iyoha, F.O., & D. Oyerinde. 2009. *Accounting Infrastructure and Accountability in the Management of Public Expenditure in Developing Countries: A Focus on Nigeria*. *Critical Perspectives on Accounting* 21: 361-373.

- Jogiyanto, & Abdillah, W. (2009). *Konsep & Aplikasi PLS Untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Juanda, Bambang., 2009, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. IPB Press. Bogor.
- Juwita, Rakhmini. (2014). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* ISSN: 2088-0685 Vol.4 No. 2, Oktober 2014 Pp 615-622.
- Kim, Soojon., dan Scachter, Hindy Lauer. 2013. *Citizen Participation in The Budget Process and Local Government Accountability. Case Studies of Organizational Learning from The United States and South Korea*. Public Performance and Management Review. Vol. 36, Page 456-471.
- Kurniawan, David. 2018. "Pengelolaan BUMDes di Bantul Belum Optimal". *Jogjapolitan*, 13 Agustus 2018. Diakses pada 30 Juni 2019. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/08/13/511/933800/pengelolaan-bumdes-di-bantul-belum-optimal>
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (n.d.). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 106–115.
- M. Kasila and L. M. Kolopaking, "Partisipasi Pemuda Desa dalam Perkembangan Usaha Bumdes ' Tirta Mandiri ' (Studi di Desa Ponggok , Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)," *J. Sains Komun. dan Pengemb. Masy.*, 2018.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Martha, W. 2014. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Di Kota Bandung. *Skripsi*. Universitas Widyatama.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nazaruddin, I., dan Basuki, A. T. 2017. *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 265.
- Nurwullan, E., Suharno, & Tinaprilla, N. (2015). Aplikasi Partial Least Square Dalam Pengujian Implikasi Jaringan Kerjasama Dan Inovasi Usaha Mikro Kecil Pengolahan Kedelai Application of Partial Least Square to Assess the Impact of Collaboration Networks on Innovation from MSEs ' Soybean Processing.

Informatika Pertanian, Vol. 24 No, 205–214.

- Onuorah, A. C., & Appah, E. 2012. *Accountability and Public Sector Financial Management in Nigeria. Arabian Journal of Business and Management Review*, 1(6), 1-17.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni
- Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Pratolo, S. 2005. *Double Entry Book Keeping dan Accrual Basis sebagai Pendukung Akuntabilitas Sektor Publik*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 2(2), 105-114.
- Priyatno, Dwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi.
- Putri, E.M.N., Tanjung, A.R., dan Susilatri. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1).
- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia, No 5495.
- Reza M.Z. “Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam kabupaten Purwakarta”, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol.5, No 1, 2016.
- Robbins, S. P. 2007. *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta:PT. Indeks . Gramedia. Edisi Kesepuluh.
- Rofika dan Ardianto. 2014. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi ISSN 2337-4314* 2(2), 197-209.
- Rudana, N. 2005. Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ekonomi. Universitas Diponegoro*.
- Sagala, R. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Rajawali Pers.
- Sopannah 2005. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Daerah dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Logos*. Vol.3 No.1.
- Sudirman., & Widjanarko, (2001). *AKIB dan Pengukuran Kinerja, Bahan Ajar*

Diklatpim Tingkat III dalam Bidang Kajian Manajemen Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumarsono, Sonny.(2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Uphoff, NT.,Cohen, JM., dan Goldsmith, AA. *Rural Development Committee: Feasibility and Application of Rural Development Participation: A State-of-the-Arth Paper*. New York: Cornell University.

Wiguna, M.B., Yuniartha, G. A., & Darmawan, N. A. 2015. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha.

“Bangun Desa Melalui BUMDES”

Ksp, 19 Februari 2019. Diakses pada 30 Juni 2019.

<http://ksp.go.id/bangun-desa-melalui-bumdes/index.html>

“2019, Mendes Ingin Alokasi Dana Desa Lebih Banyak untuk BUMDes”

Finance, 06 Februari 219. Diakses pada 30 Juni 2019.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4416915/2019-mendes-ingin-alokasi-dana-desa-lebih-banyak-untuk-bumdes>

Zitri, Ilhani. 2017. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Empat Desa Di Kecamatan Maluk dan Sengkongkong Kabupaten Sumbawa Barat*. *Thesis*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.